

PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT



**RENCANA KERJA**

**PERUBAHAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**2022**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dimana Penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2022 mengacu pada RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Matriks Renja Perubahan Tahun 2022 disusun berdasarkan *Automatic Adjustment* yang telah dilaksanakan serta menyesuaikan rekomendasi BPK RI terhadap penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 masih menggunakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 dimana target kinerja yang tercantum pada Renja Perubahan ini disusun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ditetapkan pada *automatic adjustment* sehingga terdapat beberapa penyesuaian terhadap target kinerja dan penganggaran pada Tahun 2022.

Semoga Renja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2022 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 serta dapat mencapai hasil yang baik dalam pengembangan dalam bidang kepegawaian di Provinsi Kalimantan Barat yang kedepanya dapat diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunannya.

Pontianak, 2022

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat,



**Drs. ANI SOFIAN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650602 198603 1 018

# DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>Daftar Isi.....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR Tabel.....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>BAB1 PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum .....   | 3          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....   | 4          |
| 1.3.1 Maksud.....  | 4          |
| 1.3.2 Tujuan .....   | 4          |
| 1.4 Sistematika Dokumen Renja .....  | 5          |
| <b>BAB 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu .....</b>                             | <b>6</b>   |
| 11.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 6          |
| 11.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                               | 24         |
| 11.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat DAerah .....         | 25         |
| 11.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                       | 27         |
| <b>BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>                                | <b>39</b>  |
| 111.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....                                      | 39         |
| 111.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .....                                | 39         |
| 111.3 Program dan Kegiatan .....   | 40         |
| <b>Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>                       | <b>41</b>  |
| <b>Bab 5 PENUTUP .....</b>   | <b>42</b>  |

## LAMPIRAN

- Rencana Kerja BKD Prov Kalbar TA. 2022

# DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020.....                      | 7  |
| Tabel 2. Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2020 .....                  | 21 |
| Tabel 3. Target dan Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2018– 2020 ..... | 23 |
| Tabel 4. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 .....                         | 28 |

# BAB1 PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Perubahan dimana sistematika penyusunannya disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui tahap persiapan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; perumusan rancangan akhir, penetapan Renja, dan Penetapan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan kondisional yang disebabkan adanya perubahan terhadap kebijakan penganggaran yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Dalam proses penyusunan Renja Perubahan ini telah menyesuaikan dengan *Automatic Adjustment* serta tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK RI terhadap penganggaran BKD Prov. Kalbar. Selanjutnya dalam Renja Perubahan telah mengakomodir perubahan nomenkelatur Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar yang telah ditetapkan pada Tahun 2019, hasil rapat-rapat kerja atau koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian yang melibatkan instansi dan stakeholder terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penyusunan Renja ini memperhatikan hasil kinerja program/kegiatan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis, mempertimbangkan sinergi antar sektor, koordinasi antar OPD baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya.

Selanjutnya, Renja Perubahan Tahun 2022 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Penyempurnaan dan DPA Perubahan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan tahun ke-empat RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dimana mengakomodir 2 (dua) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan yang mencakup :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan antara lain :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan antara lain :
  - a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
  - b. Mutasi dan Promosi ASN;
  - c. Pengembangan Kompetensi ASN; dan
  - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

## I.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja 2022 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5671);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomer 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberap kali dan berakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 28 September 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 123 Tahun 2016 tanggal 12 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **I.3.1 MAKSUD**

- a. Pedoman dan dasar penyusunan Kegiatan Tahun 2022.
- b. Acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.

#### **I.3.2 TUJUAN**

- a. Penjabaran atas Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018-2023, dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran indikatif.
- b. Menyelaraskan program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dengan program nasional di bidang kepegawaian, program kabupaten/kota, isu-isu strategis, usulan-



usulan pada forum Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang, serta saran masukan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang kepegawaian.

#### **I.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA**

Dokumen Renja 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I. Pendahuluan**

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan

##### **Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **Bab III. Tujuan dan Sasaran Renja**

- III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- III.4. Program dan Kegiatan

##### **Bab IV. Rencana Program dan Kegiatan**

##### **Bab V. Penutup**

# BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

## II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan Renja OPD dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020

TABEL 1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020

| KODE REKENING             | INSTANSI DAN ORGANISASI                                 | INDIKATOR KINERJA                   | TARGET     | ANGGARAN N            | REALISASI             | %            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1                         | 2   | 3                                   | 4          | 5                     | 6                     | 7            |
| <b>TOTAL BELANJA</b>      |   |                                     |            | <b>14.295.273.369</b> | <b>13.996.105.447</b> | <b>97,91</b> |
|                           | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                           |                                     |            | <b>7.789.756.299</b>  | <b>7.676.801.801</b>  | <b>98,55</b> |
|                           | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                 |                                     |            | <b>6.505.517.070</b>  | <b>6.319.303.646</b>  | <b>97,14</b> |
| <b>4.03.4.03.01.01</b>    | <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                         |                                     |            | <b>6.505.517.070</b>  | <b>6.319.303.646</b>  | <b>97,14</b> |
| <b>4.03.4.03.01.01.01</b> | <b>PROGRAM PELAYANAN<br/>ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>   |                                     |            | <b>1.213.506.442</b>  | <b>1.205.642.132</b>  | <b>99,35</b> |
| 4.03.4.03.01.01.01.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Tersedianya Jasa Surat Menyurat     | 25 Berkas  | 8.750.000             | 5.759.000             | 65,82        |
| 4.03.4.03.01.01.01.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Pelayanan Telepon dan Internet | 1 Rekening | 25.000.000            | 21.329.681            | 85,32        |
| 4.03.4.03.01.01.01.04     | Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas    | 6 Unit     | 4.200.000             | 3.579.300             | 85,22        |
| 4.03.4.03.01.01.01.05     | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                   | Tersedianya Jumlah Materai          | 2 Item     | 9.735.000             | 9.733.750             | 99,99        |

| KODE REKENING         | INSTANSI DAN ORGANISASI  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET   | ANGGARAN N  | REALISASI   | %      |
|-----------------------|--|---|----------|-------------|-------------|--------|
| 1                     | 2  | 3   | 4        | 5           | 6           | 7      |
| 4.03.4.03.01.01.01.07 | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Jenis - Jenis ATK BKD Prov.Kalbar                           | 54 Item  | 87.437.000  | 87.437.000  | 100,00 |
| 4.03.4.03.01.01.01.08 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jenis - Jenis Belanja Cetak dan Pengandaan Keperluan Kantor | 2 Item   | 145.341.000 | 145.341.000 | 100,00 |
| 4.03.4.03.01.01.01.09 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                         | Jenis Alat Listrik dan Elektronik                           | 5 Item   | 13.000.000  | 13.000.000  | 100,00 |
| 4.03.4.03.01.01.01.10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Peralatan dan Perlangkapan Kantor                           | 8 Item   | 87.900.000  | 87.880.500  | 99,98  |
| 4.03.4.03.01.01.01.11 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga   | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                          | 21 Item  | 97.775.000  | 97.774.000  | 100,00 |
| 4.03.4.03.01.01.01.12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                   | Tersedianya surat kabar atau majalah                        | 2 Item   | 26.860.000  | 26.835.000  | 99,91  |
| 4.03.4.03.01.01.01.13 | Penyediaan Makanan dan Minuman   | Makanan dan Minuman untuk tamu dan peserta rapat            | 6 Unit   | 21.210.000  | 21.190.000  | 99,91  |
| 4.03.4.03.01.01.01.14 | Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah   | Laporan Perjalanan Dinas dalam, Luar Daerah dan Luar Negeri | 25 Kali  | 58.615.242  | 58.566.329  | 99,92  |
| 4.03.4.03.01.01.01.15 | Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya | Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak                             | 12 Orang | 361.245.200 | 360.778.572 | 99,87  |

| KODE REKENING             | INSTANSI DAN ORGANISASI                                      | INDIKATOR KINERJA                                      | TARGET     | ANGGARAN N         | REALISASI          | %            |
|---------------------------|--|--|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4          | 5                  | 6                  | 7            |
| 4.03.4.03.01.01.01.16     | Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang            | Tersedianya Jasa Tata Usaha Keuangan dan Barang        | 13 Orang   | 97.840.000         | 97.840.000         | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.01.17     | Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi            | Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi     | 10 Item    | 4.000.000          | 4.000.000          | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.01.18     | Penataan dan Pemeliharaan Arsip                              | Tertatanya Arsip Kantor                                | 2000 Arsip | 99.706.000         | 99.706.000         | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.01.22     | Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik | Updating Informasi Tentang Kepegawaian                 | 12 Item    | 64.892.000         | 64.892.000         | 100,00       |
|                           |  |  |            |                    |                    |              |
| <b>4.03.4.03.01.01.02</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>              |  |            | <b>455.960.000</b> | <b>455.742.600</b> | <b>99,95</b> |
| 4.03.4.03.01.01.02.08     | Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor                    | Tersedianya Perlengkapan /Peralatan Kantor             | 4 item     | 138.920.000        | 138.750.000        | 99,88        |
| 4.03.4.03.01.01.02.09     | Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga              | Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga        | 1 Item     | 7.000.000          | 7.000.000          | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.02.11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi         | Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi | 2 Item     | 20.000.000         | 20.000.000         | 100,00       |

| KODE REKENING             | INSTANSI DAN ORGANISASI   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     | ANGGARAN N         | REALISASI          | %            |
|---------------------------|---|--|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1                         | 2   | 3  | 4          | 5                  | 6                  | 7            |
| 4.03.4.03.01.01.02.18     | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional | Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | 3 Unit     | 50.100.000         | 50.052.600         | 99,91        |
| 4.03.4.03.01.01.02.20     | Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin                                 | Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin                      | 84 Unit    | 47.640.000         | 47.640.000         | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.02.21     | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor                    | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Komputer dan Printer Kantor      | 78 Unit    | 62.600.000         | 62.600.000         | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.02.23     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi                            | Tereliharanya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi            | 1 Server   | 115.200.000        | 115.200.000        | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.02.25     | Pengembangan Sistem Informasi   | Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi                    | 1 Aplikasi | 14.500.000         | 14.500.000         | 100,00       |
|                           |   |  |            |                    |                    |              |
| <b>4.03.4.03.01.01.03</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                  |  |            | <b>121.300.000</b> | <b>121.190.000</b> | <b>99,91</b> |
| 4.03.4.03.01.01.03.01     | Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya                           | Tersedianya Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya          | 77 Stel    | 121.300.000        | 121.190.000        | 99,91        |
|                           |   |  |            |                    |                    |              |

| KODE REKENING             | INSTANSI DAN ORGANISASI   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET    | ANGGARAN N         | REALISASI          | %            |
|---------------------------|---|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1                         | 2   | 3  | 4         | 5                  | 6                  | 7            |
| <b>4.03.4.03.01.01.05</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                             |  |           | <b>93.560.400</b>  | <b>93.160.400</b>  | <b>99,57</b> |
| 4.03.4.03.01.01.05.01     | Pendidikan dan Pelatihan  | Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal PNS di Lingkungan BKD Prov.Kalbar | 10 Orang  | 16.722.000         | 16.322.000         | 97,61        |
| 4.03.4.03.01.01.05.02     | Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop   | Keikutsertaan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop                             | 15 Orang  | 8.792.400          | 8.792.400          | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.05.03     | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional   | PAK Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian yang telah dilakukan penilaian           | 12 DUPAK  | 53.185.000         | 53.185.000         | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.05.06     | Penyusunan Penetapan Kinerja  | Tersedianya Dokumen Anjab BKD Prov.Kalbar  | 2 Dokumen | 14.861.000         | 14.861.000         | 100,00       |
|                           |   |  |           |                    |                    |              |
| <b>4.03.4.03.01.01.06</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |  |           | <b>368.537.000</b> | <b>368.482.000</b> | <b>99,99</b> |

| KODE REKENING             | INSTANSI DAN ORGANISASI                            | INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET    | ANGGARAN N        | REALISASI         | %            |
|---------------------------|--|---|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4         | 5                 | 6                 | 7            |
| 4.03.4.03.01.01.06.01     | Penyusunan Laporan Keuangan                        | Penyusunan Laporan semester I dan II Keuangan BKD     | 1 Dokumen | 34.965.000        | 34.965.000        | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.06.02     | Penyusunan LAKIP                                   | Penyusunan Laporan semester I dan II Keuangan BKD     | 1 Dokumen | 21.705.000        | 21.705.000        | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.06.04     | Penyusunan RENJA SKPD                              | Penyusunan Renja Kerja BKD Prov.Kalbar                | 1 Dokumen | 28.055.000        | 28.055.000        | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.06.05     | Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ             | Penyusunan Renja Kerja BKD Prov.Kalbar                | 2 Dokumen | 26.066.000        | 26.066.000        | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.06.06     | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                 | Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 1 Dokumen | 75.917.000        | 75.917.000        | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.06.07     | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                   | Penyusunan RKA dan DPA BKD Prov.Kalbar                | 4 Dokumen | 34.215.000        | 34.215.000        | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.06.09     | Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran         | Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran | 1 Dokumen | 74.356.000        | 74.356.000        | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.06.10     | Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi    | Layanan Informasi Pelayanan Kepegawaian               | 1 Dokumen | 73.258.000        | 73.203.000        | 99,92        |
|                           |  |   |           |                   |                   |              |
| <b>4.03.4.03.01.01.07</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b> |   |           | <b>29.790.000</b> | <b>29.390.000</b> | <b>98,66</b> |



| KODE REKENING             | INSTANSI DAN ORGANISASI   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET    | ANGGARAN N           | REALISASI            | %            |
|---------------------------|---|--|-----------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1                         | 2   | 3  | 4         | 5                    | 6                    | 7            |
| 4.03.4.03.01.01.07.01     | Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset                                      | Tersusunnya laporan Inventarisasi Asset  | 2 laporan | 29.790.000           | 29.390.000           | 98,66        |
| <b>4.03.4.03.01.01.15</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR SIPIL NEGARA</b> |  |           | <b>2.647.550.928</b> | <b>2.490.888.214</b> | <b>94,08</b> |
| 4.03.4.03.01.01.15.01     | Pelaksanaan Baperjakat  | Sidang/Rapat BAPERJAKAT  | 7 Kali    | 129.977.000          | 111.177.000          | 85,54        |
| 4.03.4.03.01.01.15.02     | Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar                                       | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar  |           | 8.412.200            | 8.412.200            | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.15.03     | Penyelesaian Administrasi PNS Tugas Belajar dilingkungan Pemprov. Kalbar        | Fasilitasi administrasi dan bantuan beasiswa bagi PNS yang mengikuti tugas belajar di lingkungan Pemprov. Kalbar | 11 Orang  | 69.741.162           | 69.309.988           | 99,38        |
| 4.03.4.03.01.01.15.05     | Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural          | Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan  | 6 Kali    | 244.166.000          | 229.566.000          | 94,02        |

| KODE REKENING         | INSTANSI DAN ORGANISASI  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET     | ANGGARAN N  | REALISASI   | %      |
|-----------------------|--|---|------------|-------------|-------------|--------|
| 1                     | 2  | 3   | 4          | 5           | 6           | 7      |
| 4.03.4.03.01.01.15.06 | Penyelesaian Administrasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional | Keputusan tentang Pengangkatan/Pembebasan Sementara/Pemberhentian/Kenaikan Jabatan/Pengukuhan/Penyesuaian Tunjangan dan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional |            | 93.357.000  | 93.357.000  | 100,00 |
| 4.03.4.03.01.01.15.09 | Penyelesaian Administrasi PNS Ijin Belajar Dilingkungan Pemprov. Kalbar  | Terfasilitasinya urusan administrasi dan bantuan ijin belajar bagi PNS Pemprov. Kalbar  | 33 Orang   | 108.457.000 | 108.457.000 | 100,00 |
| 4.03.4.03.01.01.15.10 | Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi Korpri Kalbar                         | Terfasilitasinya dewan pengurus KORPRI  | 2 Item     | 33.685.900  | 32.965.900  | 97,86  |
| 4.03.4.03.01.01.15.11 | Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemprov. Kalbar     | Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi   | 10 JPT     | 504.413.000 | 449.248.700 | 89,06  |
| 4.03.4.03.01.01.15.12 | Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN                                      | Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN   | 1000 Orang | 92.581.000  | 92.061.000  | 99,44  |
| 4.03.4.03.01.01.15.16 | Pelaksanaan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional              | Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional  | 4 Kali     | 46.348.000  | 44.934.000  | 96,95  |

| KODE REKENING         | INSTANSI DAN ORGANISASI  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET    | ANGGARAN N  | REALISASI   | %      |
|-----------------------|--|--|-----------|-------------|-------------|--------|
| 1                     | 2  | 3  | 4         | 5           | 6           | 7      |
| 4.03.4.03.01.01.15.17 | Penyelesaian Administrasi Peningkatan Pendidikan PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar                          | SK Penetapan Penyesuaian Gelar Pendidikan PNS  | 100 Org   | 34.221.400  | 33.871.400  | 98,98  |
| 4.03.4.03.01.01.15.18 | Seleksi CPNS Pemprov.Kalbar  | Pelamar CPNS   | 4 Kali    | 546.455.766 | 526.390.726 | 96,33  |
| 4.03.4.03.01.01.15.19 | Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Korp ASN  | Terfasilitasinya Kebijakan Pengembangan Kelembagaan  | 1 Dokumen | 40.319.600  | 39.679.600  | 98,41  |
| 4.03.4.03.01.01.15.20 | Fasilitasi Penyelesaian Administrasi dan Alih Jenis Kepegawaian Lulusan IPDN asal Pendaftaran Prov. Kalbar | Dokumen Kepegawaian Para Lulusan IPDN yang ditugaskan di Provinsi Kalimantan Barat                                 | 33 Orang  | 11.364.000  | 11.364.000  | 100,00 |
| 4.03.4.03.01.01.15.21 | Seleksi, penetapan dan pemberangkatan PNS untuk tugas belajar  | Pelaksanaan program fasilitasi tugas belajar melalui seleksi, penetapan dan pemberangkatan PNS untuk tugas belajar | 25 Orang  | 20.085.000  | 20.085.000  | 100,00 |

| KODE REKENING         | INSTANSI DAN ORGANISASI   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET   | ANGGARAN N  | REALISASI   | %      |
|-----------------------|---|---|--|-------------|-------------|--------|
| 1                     | 2   | 3   | 4  | 5           | 6           | 7      |
| 4.03.4.03.01.01.15.22 | Penyelesaian Administrasi Diklat Pim Tk II, III dan IV dan Pelatihan Dasar serta Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tk II | Pelaksanaan Fasilitas pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemprov. Kalbar | selon II = 6 Orang<br>Eselon III = 40 Orang<br>Eselon IV = 40 Orang<br>Pelatihan Dasar = 100 Orang | 400.623.000 | 358.722.800 | 89,54  |
| 4.03.4.03.01.01.15.23 | Inventarisasi dan Pemetaan Potensi PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar   | Tersedianya dokumen Potensi PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar  | 100 Orang  | 87.337.500  | 86.937.500  | 99,54  |
| 4.03.4.03.01.01.15.24 | Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional  | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional  | 9 OPD  | 55.213.000  | 53.955.000  | 97,72  |
| 4.03.4.03.01.01.15.29 | Penyelesaian Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar  | Terselesaikannya Peninjauan Masa Kerja PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar   | 10 SK  | 28.078.000  | 28.078.000  | 100,00 |
| 4.03.4.03.01.01.15.31 | Penyusunan Standar Kompetensi jabatan   | Tersusunnya Standar Kompetensi jabatan  | 1 Dokumen  | 35.185.000  | 34.785.000  | 98,86  |

| KODE REKENING             | INSTANSI DAN ORGANISASI   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET      | ANGGARAN N         | REALISASI          | %            |
|---------------------------|---|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1                         | 2   | 3  | 4           | 5                  | 6                  | 7            |
| 4.03.4.03.01.01.15.32     | Penyusunan Formasi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | Tersusunnya Formasi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | 4 Kali      | 57.530.400         | 57.530.400         | 100,00       |
| <b>4.03.4.03.01.01.16</b> | <b>PROGRAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA</b>                            |  |             | <b>256.458.300</b> | <b>253.258.300</b> | <b>98,75</b> |
| 4.03.4.03.01.01.16.04     | Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin                                     | Rekomendasi dan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap PNS         | 10 Kasus    | 50.387.100         | 49.747.100         | 98,73        |
| 4.03.4.03.01.01.16.05     | Penertiban Disiplin Aparatur Pemerintah Daerah                            | Inspeksi/Penertiban Disiplin PNS   | 45 OPD      | 46.836.300         | 46.196.300         | 98,63        |
| 4.03.4.03.01.01.16.06     | Penyelesaian LHKPN  | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara                                | 900 Laporan | 50.739.700         | 50.099.700         | 98,74        |
| 4.03.4.03.01.01.16.08     | Penyelesaian Permohonan Izin Perceraian PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar  | Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat                                  | 15 SK       | 44.143.000         | 43.503.000         | 98,55        |
| 4.03.4.03.01.01.16.09     | Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS                         | Rumusan Kebijakan Kesejahteraan PNS  | 1 Dokumen   | 64.352.200         | 63.712.200         | 99,01        |
|                           |   |  |             |                    |                    |              |

| KODE REKENING         | INSTANSI DAN ORGANISASI   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET         | ANGGARAN N           | REALISASI            | %            |
|-----------------------|---|---|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1                     | 2   | 3   | 4              | 5                    | 6                    | 7            |
| 4.03.4.03.01.01.17    | <b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM DAN LAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA</b>        |   |                | <b>1.318.854.000</b> | <b>1.301.550.000</b> | <b>98,69</b> |
| 4.03.4.03.01.01.17.01 | Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Gol IVa keatas Pemkot/Pemkab                          | Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS Gol. IV/a keatas di lingkungan pemkot/pemkab se-kalimantan barat | 100 Org        | 119.036.000          | 118.076.000          | 99,19        |
| 4.03.4.03.01.01.17.02 | Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hak Pensiun | SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan SK Pensiun   | 350 PNS        | 111.075.400          | 110.085.400          | 99,11        |
| 4.03.4.03.01.01.17.03 | Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)                                | Data SAPK di lingkungan Pemprov. Kalbar   | 11062 Data     | 59.968.000           | 59.968.000           | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.17.04 | Penyelesaian SKP PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar  | Terlaksananya fasilitasi penyusunan SKP Pegawai Negeri Sipil                                    | 11062 Berkas   | 64.413.000           | 64.413.000           | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.17.05 | Rekonsiliasi Data Berkala Simpeg  | Rekonsiliasi Data Simpeg Secara Berkala   | 11062 Data PNS | 16.075.000           | 16.075.000           | 100,00       |
| 4.03.4.03.01.01.17.06 | Pembuatan Profil Kepegawaian Dilingkungan Pemprov. Kalbar                               | Profil Kepegawaian  | 2 item         | 7.673.000            | 7.673.000            | 100,00       |

| KODE REKENING         | INSTANSI DAN ORGANISASI  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET        | ANGGARAN N  | REALISASI   | %      |
|-----------------------|--|---|---------------|-------------|-------------|--------|
| 1                     | 2  | 3   | 4             | 5           | 6           | 7      |
| 4.03.4.03.01.01.17.07 | Pemuktahiran Data Simpeg dilingkungan Pemprov.Kalbar                       | Data PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat   | 11062 PNS     | 62.585.000  | 62.585.000  | 100,00 |
| 4.03.4.03.01.01.17.08 | Penyelesaian Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian                  | Proses Penyelesaian Administrasi Pindah PNS dan Alih Jenis  | 400 PNS       | 113.389.000 | 112.099.000 | 98,86  |
| 4.03.4.03.01.01.17.09 | Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala                            | Penetapan Kenaikan gaji berkala (KGB) PNS golongan ruang III/d ke atas PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat | 1000 PNS      | 116.126.500 | 115.166.500 | 99,17  |
| 4.03.4.03.01.01.17.10 | Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS                               | Dokumen Kepegawaian PNS di lingkungan Pemprov.Kalbar yang tertata dan terpelihara   | 11062 Dokumen | 108.576.000 | 108.576.000 | 100,00 |
| 4.03.4.03.01.01.17.11 | Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar | SK Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Prov.Kalbar  | 1250 SK       | 193.933.500 | 185.732.500 | 95,77  |
| 4.03.4.03.01.01.17.12 | Pemberkasan dan Penetapan NIP CPNS pemprov.Kalbar                          | Terselesaikannya Penetapan NIP CPNS Prov.Kalbar   | 300 SK        | 11.890.000  | 11.890.000  | 100,00 |
| 4.03.4.03.01.01.17.13 | Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar      | Usulan Karis/Karsu  | 300 kartu     | 58.469.600  | 57.829.600  | 98,91  |

| KODE REKENING         | INSTANSI DAN ORGANISASI                            | INDIKATOR KINERJA   | TARGET     | ANGGARAN N  | REALISASI   | %      |
|-----------------------|--|---|------------|-------------|-------------|--------|
| 1                     | 2  | 3   | 4          | 5           | 6           | 7      |
| 4.03.4.03.01.01.17.14 | Sistem Pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik   | Pengembangan Sistem Pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik | 1 Aplikasi | 232.358.000 | 228.095.000 | 98,17  |
| 4.03.4.03.01.01.17.15 | Perubahan Status CPNS Menjadi PNS                  | Terlaksananya Perubahan Status CPNS Menjadi PNS               | 367 Orang  | 23.286.000  | 23.286.000  | 100,00 |
| 4.03.4.03.01.01.17.16 | Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg) PNS Prov. Kalbar | Tersedianya Kartu Pegawai (Karpeg) PNS Prov. Kalbar           | 367 Kartu  | 20.000.000  | 20.000.000  | 100,00 |



Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 umumnya menunjukkan kinerja yang memuaskan baik pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar maupun dengan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar Tahun 2020. Dengan rerata capaian indikator sebesar **62,65%** dengan persentase tingkat keberhasilan sebesar **106,19%** untuk capaian IKU. Capaian tersebut menggambarkan keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah sesuai dengan harapan pada tahun 2020. Namun kedepannya diperlukan konsistensi dan upaya lebih dalam pencapaian target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Capaian indikator tersebut mengacu pada RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023 serta Renstra Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar 2018-2023 yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih sebelumnya. Pada Tahun 2019 juga merupakan tahun awal penerapan pencapaian indikator kinerja OPD yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah ditandatangani bersama Gubernur Terpilih.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 akan dilihat pada pencapaian indikator dan analisisnya pada IKU Dinas Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar. Capaian kinerja utama TA 2020 adalah sebagai berikut:

TABEL 2. Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2020

| No                                 | Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja Utama |  | Capaian Kinerja Tahun 2020 |           | Tingkat Kemajuan (%) |
|------------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|-----------|----------------------|
|                                    |  |                         |  | Target                     | Realisasi |                      |
| 1                                  | 2  | 3                       |  | 4                          | 5         | 6                    |
| 1                                  | Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara | 1.1                     | Persentase Aparatur sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan | 79,00                      | 64,5      | 81,65                |
| <b>RERATA CAPAIAN KINERJA SS 1</b> |  |                         |  |                            |           | <b>81,65</b>         |

Sumber : BKD Prov. Kalbar 2021.

- **Persentase Aparatur sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan**

Indikator tersebut merupakan penjabaran dari misi ke-2 Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance” yang telah mengalami perubahan terhadap indikator sebelumnya yang disebabkan oleh hasil dari evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut tidak lepas dari adanya peningkatan terhadap jumlah jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan baik pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Rumus perhitungan dari indikator tersebut diperoleh melalui persentase perbandingan antara jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi jabatan (struktural dan fungsional) dibandingkan dengan jumlah ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Namun kedepannya hal yang perlu menjadi perhatian yaitu masih kurang menariknya Jabatan Fungsional bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat baik yang disebabkan oleh kurangnya informasi terkait dengan Jabatan Fungsional, sulitnya pencapaian angka kredit Jabatan Fungsional, maupun minimnya anggaran instansi untuk mengikuti diklat serta uji kompetensi dalam rangka pengembangan karir jabatan fungsional.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya mensosialisasikan Jabatan Fungsional dalam pengembangan karir ASN, mendorong OPD untuk mengalokasikan penganggaran dalam rangka pengembangan karir jabatan fungsional, serta mendorong ASN untuk mengikuti diklat serta beralih menjadi pebajat fungsional dimana pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan persentase aparatur yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan pada lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Tahun 2019 merupakan tahun awal penggunaan indikator yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023 maupun Renstra Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar 2018-2023 dimana pada Tahun 2018 masih menggunakan indikator yang tertuang pada periode Renstra sebelumnya. Indikator kinerja serta pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kalbar beserta pencapaiannya pada tahun 2018 - 2020 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.Target dan Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2018– 2020

| No | Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja Utama |  | SATUAN | Realisasi |       |       |       |       |      |
|----|--|-------------------------|--|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|
|    |  |                         |  |        | 2018      |       | 2019  |       | 2020  |      |
|    |  |                         |  |        | T         | R     | T     | R     | T     | R    |
| 1  | 2  | 3                       |  | 4      | 5         |       | 6     |       | 7     |      |
| 1  | MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA | 1.1                     | Persentase Aparatur sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan | %      | -         | 54,00 | 59,00 | 62,65 | 79,00 | 64,5 |

Keterangan : T = Target ; R = Realisasi

## II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas pokok, membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- b. Melakukan pemantauan , evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- c. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, ada beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Provinsi Kalimantan Barat;
2. Peningkatan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peningkatan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari Indikator Kinerja diatas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas aparaturnya melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang dicitakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang kepegawaian dapat terwujud.

### **II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu

strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- a. Belum optimalnya implementasi Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
- b. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Penerapan E-Government;
- d. Belum maksimalnya penerapan Sistem Penilaian Kinerja secara berbasis eletronik;
- e. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal sesuai dengan kompetensinya dan penerapan pelaksanaan uji kompetensi.

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah: Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur ; Sasaran yang ingin dicapai dalam manajemen kepegawaian adalah:

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Meningkatkan pemenuhan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara; dan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Adminitrasi Kepegawaian; dan
5. Meningkatkan kualiatas pelayanan Internal

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan pelatihan manejerial;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan Pegawai Negeri Sipil melalui beasiswa tugas belajar ;
3. Meningkatkan kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui uji kompetensi;

4. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku Aparatur Sipil Negara;
5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil Negara melalui pemenuhan kebutuhan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara;

## **II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun

Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang telah disusun sebagai tahun keempat pencapaian RPJMD Kalbar 2018-2023 yang telah mengakomodir kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Namun terdapat penyesuaian antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dan Renja OPD Tahun 2022 dimana dalam penyusunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang maksimal, adil dan merata bagi masyarakat dengan penganggaran yang efisien.

Namun dalam proses yang telah berlangsung, terdapat perubahan pada kegiatan serta penganggaran sehingga terdapat perbedaan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan Renja Tahun 2022 yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022

| Kode                   | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan                               | Target    | Pagu Indikatif Tahun 2022 |
|------------------------|---|---|-----------|---------------------------|
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  |   |           | 19.012.679.019,00         |
| 5.03                   | KEPEGAWAIAN   |   |           | 19.012.679.019,00         |
| 5.03.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 |   |           | 13.509.606.469,00         |
| 5.03.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Indikator: Persentase Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu | 100%      | 151.480.164,00            |
| 5.03.01.1.01.01        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan  | 1 Dokumen | 26.619.379,00             |
| 5.03.01.1.01.02        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen | 22.851.238,00             |
| 5.03.01.1.01.05        | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen | 31.754.620,00             |
| 5.03.01.1.01.06        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD            | 1 Dokumen | 39.289.955,00             |
| 5.03.01.1.01.07        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | 1 Dokumen | 30.964.972,00             |



| Kode                | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan                                    | Target           | Pagu Indikatif Tahun 2022 |
|---------------------|---|--|------------------|---------------------------|
| <b>5.03.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | <b>Indikator: Jumlah Laporan Keuangan</b>  | <b>3 Laporan</b> | <b>11.314.485.575,00</b>  |
| 5.03.01.1.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 12 Bulan         | 10.655.750.000,00         |
| 5.03.01.1.02.03     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Dokumen Keuangan yang Diverifikasi  | 1 Dokumen        | 579.077.120,00            |
| 5.03.01.1.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun Tepat Waktu                       | 1 Dokumen        | 19.059.775,00             |
| 5.03.01.1.02.07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu                                   | 1 Dokumen        | 60.598.680,00             |
| <b>5.03.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | <b>Indikator: Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> | <b>100%</b>      | <b>22.947.954,00</b>      |
| 5.03.01.1.03.06     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD     | 1 Dokumen        | 22.947.954,00             |

| <b>Kode</b>         | <b>Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>         | <b>Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan</b>                          | <b>Target</b> | <b>Pagu Indikatif Tahun 2022</b> |
|---------------------|--|---|---------------|----------------------------------|
| <b>5.03.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Indikator: Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Prosedur</b> | <b>100%</b>   | <b>190.806.641,00</b>            |
| 5.03.01.1.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas  | 93 Stel       | 66.030.000,00                    |
| 5.03.01.1.05.03     | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | 1 Dokumen     | 61.796.939,00                    |
| 5.03.01.1.05.05     | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Individu   | 80 Dokumen    | 23.084.702,00                    |
| 5.03.01.1.05.09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Minimal 20 JP                              | 50 Orang      | 27.500.000,00                    |
| 5.03.01.1.05.10     | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Jumlah Sosialisasi                                | 11 Orang      | 2.420.000,00                     |
| 5.03.01.1.05.11     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Peserta Bimtek   | 35 Orang      | 9.975.000,00                     |
|                     |  |   |               |                                  |
| <b>5.03.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Indikator: Persentase Pemenuhan Barang</b>                                   | <b>98%</b>    | <b>676.450.625,00</b>            |
| 5.03.01.1.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | 7 item        | 19.028.320,00                    |

| Kode                | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan                             | Target              | Pagu Indikatif Tahun 2022 |
|---------------------|---|---|---------------------|---------------------------|
| 5.03.01.1.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | 7 Jenis             | 95.906.350,00             |
| 5.03.01.1.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga   | 14 Jenis            | 93.836.765,00             |
| 5.03.01.1.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | 17 Jenis            | 138.443.750,00            |
| 5.03.01.1.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                  | 2 Jenis             | 30.000.000,00             |
| 5.03.01.1.06.08     | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Persentase Kunjungan Tamu yang Difasilitasi                                 | 100%                | 90.000.000,00             |
| 5.03.01.1.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 | 14 Kali             | 86.776.000,00             |
| 5.03.01.1.06.10     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah arsip yang diolah  | 5 Jenis             | 62.940.670,00             |
| 5.03.01.1.06.11     | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Sistem yang Dikelola   | 10 Sistem Informasi | 59.518.770,00             |
|                     |   |   |                     |                           |
| <b>5.03.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Indikator: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas</b> | <b>95%</b>          | <b>703.561.550,00</b>     |

| Kode                | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan   | Target      | Pagu Indikatif Tahun 2022 |
|---------------------|--|---|-------------|---------------------------|
| 5.03.01.1.07.05     | Pengadaan Mebel  | Jumlah Pengadaan Mebelair   | Unit        | 106.201.250,00            |
| 5.03.01.1.07.11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                   | 6 Item      | 597.360.300,00            |
|                     |  |   |             |                           |
| <b>5.03.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Indikator: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>100%</b> | <b>139.501.255,00</b>     |
| 5.03.01.1.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Surat Menyurat yang Dikirim  | 50 berkas   | 2.326.750,00              |
| 5.03.01.1.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 12 Bulan    | 25.000.000,00             |
| 5.03.01.1.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 100%        | 112.174.505,00            |
|                     |  |   |             |                           |
| <b>5.03.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Indikator: Persentase BMD Dalam Kondisi Baik</b>   | <b>80%</b>  | <b>310.372.705,00</b>     |
| 5.03.01.1.09.01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan yang Disediakan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3 unit      | 68.759.205,00             |

| <b>Kode</b>         | <b>Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>                                     | <b>Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan</b>                                  | <b>Target</b>    | <b>Pagu Indikatif Tahun 2022</b> |
|---------------------|--|---|------------------|----------------------------------|
| 5.03.01.1.09.11     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan yang dipelihara          | 150 unit         | 241.613.500,00                   |
| <b>5.03.02</b>      | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  |   |                  | <b>5.503.072.550,00</b>          |
| <b>5.03.02.1.01</b> | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>                                | <b>Indikator: Jumlah Dokumen Formasi Pengadaan dan Data ASN</b>                         | <b>1 Dokumen</b> | <b>1.048.478.737,00</b>          |
| 5.03.02.1.01.02     | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN       | Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi penerimaan CASN serta seluruh rangkaian pengadaan | 7000 orang       | 89.978.552,00                    |
| 5.03.02.1.01.03     | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                         | 1 Dokumen        | 237.530.065,00                   |
| 5.03.02.1.01.06     | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                        | 1 Dokumen        | 150.552.451,00                   |
| 5.03.02.1.01.08     | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN   | Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Dewan Pengurus Korpri                                | 1 Laporan        | 239.618.121,00                   |
| 5.03.02.1.01.09     | Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN                                 | Jumlah Dokumen Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN             | 1 Dokumen        | 42.447.966,00                    |

| <b>Kode</b>         | <b>Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>  | <b>Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan</b>                                 | <b>Target</b>      | <b>Pagu Indikatif Tahun 2022</b> |
|---------------------|---|--|--------------------|----------------------------------|
| 5.03.02.1.01.10     | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                  | Jumlah sistem Informasi Kepegawaian yang Dikelola                                      | 1 Sistem informasi | 75.435.438,00                    |
| 5.03.02.1.01.11     | Pengelolaan Data Kepegawaian                              | Persentase Pengelolaan Data Kepegawaian  | 100%               | 188.650.396,00                   |
| 5.03.02.1.01.12     | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian               | 1 Dokumen          | 24.265.748,00                    |
|                     |   |  |                    |                                  |
| <b>5.03.02.1.02</b> | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                             | <b>Indikator: Jumlah Dokumen Usulan Mutasi, Promosi, dan Layanan Sdministrasi ASN</b>  | <b>3 Dokumen</b>   | <b>1.470.250.773,00</b>          |
| 5.03.02.1.02.01     | Pengelolaan Mutasi ASN                                    | Jumlah Dokumen Pengelolaan Mutasi ASN  | 1 Dokumen          | 119.997.113,00                   |
| 5.03.02.1.02.02     | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                          | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | 6 Dokumen          | 386.962.817,00                   |
| 5.03.02.1.02.03     | Pengelolaan Promosi ASN                                   | Jumlah Dokumen Pengelolaan Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas | 8 Dokumen          | 963.290.843,00                   |
|                     |   |  |                    |                                  |

| Kode            | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan   | Target      | Pagu Indikatif Tahun 2022 |
|-----------------|---|---|-------------|---------------------------|
| 5.03.02.1.03    | Pengembangan Kompetensi ASN                         | Indikator: Persentase Pelaksanaan peningkatan kompetensi ASN sesuai rencana pengembangan  | 100%        | 2.320.391.144,00          |
| 5.03.02.1.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                   | Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kinerja PNS Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  | 3 Dokumen   | 122.557.246,00            |
| 5.03.02.1.03.02 | Pengelolaan Assessment Center                       | Jumlah Dokumen Kompetensi dan Potensi PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat  | 3 Dokumen   | 393.964.936,00            |
| 5.03.02.1.03.03 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen Pelaksanaan fasilitasi administrasi penetapan calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Latihan Dasar CPNS di lingkungan Pemprov. Kalbar | 200 Dokumen | 885.219.297,00            |
| 5.03.02.1.03.04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                 | Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendidikan Lanjutan PNS Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat   | 4 Dokumen   | 602.836.875,00            |

| Kode            | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan   | Target     | Pagu Indikatif Tahun 2022 |
|-----------------|---|---|------------|---------------------------|
| 5.03.02.1.03.05 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat                       | Jumlah Dokumen Kerjasama Instansi Pembina Penyelenggara Diklat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pelaksanaan Diklat bagi ASN Pemprov Kalbar | 30 Dokumen | 62.474.611,00             |
| 5.03.02.1.03.08 | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional   | 1 Dokumen  | 1.927.418,00              |
| 5.03.02.1.03.09 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional    | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional   | 1 Dokumen  | 40.963.952,00             |
| 5.03.02.1.03.10 | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN                             | Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional  | 400 Orang  | 90.763.952,00             |
| 5.03.02.1.03.12 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN       | Jumlah Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional   | 2 Kegiatan | 48.281.271,00             |
| 5.03.02.1.03.13 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                  | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional   | 3 Dokumen  | 53.546.212,00             |



| Kode                | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan  | Target      | Pagu Indikatif Tahun 2022 |
|---------------------|--|--|-------------|---------------------------|
| 5.03.02.1.03.14     | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah Pejabat Fungsional yang Dilakukan Pengangkatan, Pelantikan, Kenaikan, Alih Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional | 400 Orang   | 17.855.374,00             |
| <b>5.03.02.1.04</b> | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>         | <b>Indikator: Persentase aparatur berkinerja baik</b>  | <b>100%</b> | <b>663.951.896,00</b>     |
| 5.03.02.1.04.02     | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur    | Peresentase Penyampaian Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat             | 100%        | 103.553.025,00            |
| 5.03.02.1.04.04     | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai         | Jumlah Pegawai yang diberikan penghargaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat/Kabupaten/Kota                   | 400 Orang   | 67.895.000,00             |
| 5.03.02.1.04.05     | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai                    | Jumlah Dokumen Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai   | 1 Dokumen   | 64.654.539,00             |
| 5.03.02.1.04.07     | Pembinaan Disiplin ASN                                 | Jumlah Dokumen Pembinaan Disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat                                      | 1 Dokumen   | 154.621.580,00            |

| Kode            | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan   | Target    | Pagu Indikatif Tahun 2022 |
|-----------------|---|---|-----------|---------------------------|
| 5.03.02.1.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Dokumen Pembinaan Disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | 10 SK     | 214.982.331,00            |
| 5.03.02.1.04.09 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai          | Jumlah Dokumen Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                                 | 1 Dokumen | 58.245.421,00             |

# **BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

## **III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Lelang Jabatan merupakan langkah yang dilakukan pemerintah menjamin pejabat mendapatkan posisi sesuai dengan kompetensinya. Pelaksanaan lelang jabatan pada Pemerintah Provinsi Kalbar telah dilaksanakan 2 kali yaitu tahun 2017 untuk mengisi 5 Jabatan Tinggi pratama yang kosong dan pada tahun 2018 untuk mengisi 11 Jabatan Tinggi Pratama yang lowong. Sebagai bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari KKN, pelaksanaan lelang jabatan harus sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dan senantiasa berpedoman kepada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta kebutuhan daerah.

## **III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang dituangkan pada Rencana Kerja tahun 2021 sebagai bentuk penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih :

**“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”**

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu pada Misi ke- 2 yaitu :  
**Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip**

**Good Governance** yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

Sedangkan BKD Prov. Kalbar dalam Renja Tahun 2022 sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra BKD Prov. Kalbar 2018-2023 fokus pada **penempatan aparatur yang profesional dan berahlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku** dimana target pada tahun 2022 sebesar **72%**. Terdapat penyesuaian kembali terhadap target indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar dimana hal tersebut dilakukan akibat perubahan RPJMD Prov. Kalbar serta menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang tengah dihadapi saat ini.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut dijabarkan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Program yaitu :

1. Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur; dan
2. Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin PNS

### **III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan Isu-isu penting, RKPD Tahun 2022 dan tujuan serta sasaran Tahun 2022, maka Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar pada tahun 2022 terdiri atas 2 (dua) program, 12 (duabelas) kegiatan, serta 55 (lima puluh lima) sub kegiatan dimana rencana kerja ini telah dilakukan pembahasan bersama Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda Prov. Kalbar.

# BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator inputs, outputs dan outcomes, juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Instrumen kebijakan yang dijadikan acuan untuk mencapai tujuan dan akan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat terangkum dalam beberapa program serta dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan.

Dengan program dan kegiatan serta pendanaan yang telah disusun pada tahun 2022, ditujukan agar dapat mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar baik untuk Indikator Kinerja Utama (Indikator Eselon II), Indikator Kinerja Program (Indikator Eselon III), dan Indikator Kinerja Kegiatan (Indikator Eselon IV)

Selanjutnya penjabaran program/kegiatan, pendanaan, serta target kinerja masing-masing kegiatan dapat dilihat pada **lampiran** Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini dimana pada lampiran tersebut telah terinci penyusunan program/kegiatan pada kegiatan prioritas.

## BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Perubahan Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Renja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalbar Tahun 2022 memuat kebijakan program dan kegiatan yang berorientasi pada Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Renja sebagai pedoman bagi BKD Prov. Kalbar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dibawah Pembinaan Gubernur Kalimantan Barat. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu terkait dengan kinerja aparatur ditengah masih **merebaknya Virus Covid-19** sehingga diharapkan adanya inovasi yang dapat dilakukan dan diterapkan oleh OPD maupun individu sehingga kinerja pegawai tetap maksimal dan pencapaian target OPD dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat jajaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan agar Renja Perubahan Tahun 2022 ini dapat oleh segenap *stakeholders* dan sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Lampiran 1. Rencana Kerja Perubahan BKD. Prov. Kalbar TA. 2022

| RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022 |   |           |                           | RENCANA KERJA <b>PERUBAHAN</b> TAHUN ANGGARAN 2022                                    |                  |                           |
|-----------------------------------|---|-----------|---------------------------|---|------------------|---------------------------|
| Kode                              | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Target    | Pagu Indikatif Tahun 2022 | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Target Perubahan | Pagu Perubahan Tahun 2022 |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000            | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  |           | 16.367.904.890,00         | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  |                  | 16.054.099.390,00         |
| 5.03                              | KEPEGAWAIAN   |           | 16.367.904.890,00         | KEPEGAWAIAN   |                  | 16.054.099.390,00         |
| 5.03.01                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 |           | 11.763.055.670,00         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 |                  | 11.711.900.170,00         |
| 5.03.01.1.01                      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 100%      | 98.097.300,00             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 100%             | 98.097.300,00             |
| 5.03.01.1.01.01                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 1 Dokumen | 18.241.400,00             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 1 Dokumen        | 18.241.400,00             |
| 5.03.01.1.01.02                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen | 16.694.400,00             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen        | 16.694.400,00             |
| 5.03.01.1.01.05                   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | 1 Dokumen | 19.906.200,00             | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | 1 Dokumen        | 19.906.200,00             |
| 5.03.01.1.01.06                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | 19.195.100,00             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen        | 19.195.100,00             |
| 5.03.01.1.01.07                   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Dokumen | 24.060.200,00             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Dokumen        | 24.060.200,00             |
| 5.03.01.1.02                      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 3 Laporan | 10.163.622.870,00         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 3 Laporan        | 10.163.622.870,00         |
| 5.03.01.1.02.01                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 12 Bulan  | 9.889.587.370,00          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 12 Bulan         | 9.889.587.370,00          |
| 5.03.01.1.02.03                   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 3 Dokumen | 213.780.000,00            | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 3 Dokumen        | 213.780.000,00            |
| 5.03.01.1.02.05                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1 Dokumen | 3.236.000,00              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1 Dokumen        | 3.236.000,00              |

| RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022 |   |             |                           | RENCANA KERJA <b>PERUBAHAN</b> TAHUN ANGGARAN 2022                            |                  |                           |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------------------|---|------------------|---------------------------|
| Kode                              | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Target      | Pagu Indikatif Tahun 2022 | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Target Perubahan | Pagu Perubahan Tahun 2022 |
| 5.03.01.1.02.07                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Dokumen   | 57.019.500,00             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Dokumen        | 57.019.500,00             |
| <b>5.03.01.1.03</b>               | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | <b>100%</b> | <b>23.519.600,00</b>      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | <b>100%</b>      | <b>23.519.600,00</b>      |
| 5.03.01.1.03.06                   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 1 Dokumen   | 23.519.600,00             | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 1 Dokumen        | 23.519.600,00             |
| <b>5.03.01.1.05</b>               | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>100%</b> | <b>88.073.700,00</b>      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>100%</b>      | <b>85.373.700,00</b>      |
| 5.03.01.1.05.02                   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | -           | 0                         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | -                | 0                         |
| 5.03.01.1.05.03                   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | 1 Dokumen   | 50.614.400,00             | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | 1 Dokumen        | 50.614.400,00             |
| 5.03.01.1.05.05                   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                           | 78 Dokumen  | 3.064.300,00              | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                           | 78 Dokumen       | 3.064.300,00              |
| 5.03.01.1.05.09                   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | 40 Orang    | 22.000.000,00             | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | 40 Orang         | 19.300.000,00             |
| 5.03.01.1.05.10                   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | 11 Orang    | 2.420.000,00              | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | 11 Orang         | 2.420.000,00              |
| 5.03.01.1.05.11                   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | 35 Orang    | 9.975.000,00              | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | 35 Orang         | 9.975.000,00              |
| <b>5.03.01.1.06</b>               | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>98%</b>  | <b>601.526.300,00</b>     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>98%</b>       | <b>601.526.300,00</b>     |
| 5.03.01.1.06.01                   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 7 item      | 19.024.500,00             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 7 item           | 19.024.500,00             |
| 5.03.01.1.06.02                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 7 Jenis     | 141.012.200,00            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 7 Jenis          | 141.012.200,00            |



| RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022 |  |                     |                           | RENCANA KERJA <b>PERUBAHAN</b> TAHUN ANGGARAN 2022                           |                     |                           |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------------|
| Kode                              | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Target              | Pagu Indikatif Tahun 2022 | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Target Perubahan    | Pagu Perubahan Tahun 2022 |
| 5.03.01.1.06.03                   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 14 Jenis            | 62.841.400,00             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 14 Jenis            | 62.841.400,00             |
| 5.03.01.1.06.05                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 17 Jenis            | 127.840.400,00            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 17 Jenis            | 127.840.400,00            |
| 5.03.01.1.06.06                   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | 2 Jenis             | 24.000.000,00             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | 2 Jenis             | 24.000.000,00             |
| 5.03.01.1.06.08                   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 100%                | 95.280.000,00             | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 100%                | 95.280.000,00             |
| 5.03.01.1.06.09                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 14 Kali             | 82.816.000,00             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 14 Kali             | 82.816.000,00             |
| 5.03.01.1.06.10                   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | 5 Jenis             | 25.262.300,00             | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | 5 Jenis             | 25.262.300,00             |
| 5.03.01.1.06.11                   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | 10 Sistem Informasi | 23.449.500,00             | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | 10 Sistem Informasi | 23.449.500,00             |
|                                   |  |                     |                           |  |                     |                           |
| <b>5.03.01.1.07</b>               | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>100%</b>         | <b>203.163.000,00</b>     | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>100%</b>         | <b>154.707.500,00</b>     |
| 5.03.01.1.07.05                   | Pengadaan Mebel  | -                   | 0                         | Pengadaan Mebel  | -                   | 0                         |
| 5.03.01.1.07.11                   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6 Item              | 203.163.000,00            | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6 Item              | 154.707.500,00            |
|                                   |  |                     |                           |  |                     |                           |
| <b>5.03.01.1.08</b>               | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>100%</b>         | <b>450.317.120,00</b>     | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>100%</b>         | <b>450.317.120,00</b>     |
| 5.03.01.1.08.01                   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 50 berkas           | 22.300.000,00             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 50 berkas           | 22.300.000,00             |
| 5.03.01.1.08.02                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 12 Bulan            | 1.000.000,00              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 12 Bulan            | 1.000.000,00              |
| 5.03.01.1.08.04                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 100%                | 427.017.120,00            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 100%                | 427.017.120,00            |
|                                   |  |                     |                           |  |                     |                           |

| RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022 |  |                    |                           | RENCANA KERJA <b>PERUBAHAN</b> TAHUN ANGGARAN 2022   |                    |                           |
|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------------|--|--------------------|---------------------------|
| Kode                              | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target             | Pagu Indikatif Tahun 2022 | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Perubahan   | Pagu Perubahan Tahun 2022 |
| <b>5.03.01.1.09</b>               | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>85%</b>         | <b>134.735.780,00</b>     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>85%</b>         | <b>134.735.780,00</b>     |
| 5.03.01.1.09.01                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3 unit             | 45.420.000,00             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3 unit             | 45.420.000,00             |
| 5.03.01.1.09.11                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 150 unit           | 89.315.780,00             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 150 unit           | 89.315.780,00             |
|                                   |  |                    |                           |  |                    |                           |
| <b>5.03.02</b>                    | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  |                    | <b>4.604.849.220,00</b>   | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  |                    | <b>4.342.199.220,00</b>   |
| <b>5.03.02.1.01</b>               | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>  | <b>1 Dokumen</b>   | <b>1.138.623.220,00</b>   | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>  | <b>1 Dokumen</b>   | <b>982.723.220,00</b>     |
| 5.03.02.1.01.02                   | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                             | 7000 orang         | 75.850.500,00             | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                             | 7000 orang         | 75.850.500,00             |
| 5.03.02.1.01.03                   | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK   | 1 Dokumen          | 183.117.920,00            | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK   | 1 Dokumen          | 177.217.920,00            |
| 5.03.02.1.01.06                   | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  | 1 Dokumen          | 124.949.500,00            | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  | 1 Dokumen          | 124.949.500,00            |
| 5.03.02.1.01.08                   | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN   | 2 Laporan          | 215.319.900,00            | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN   | 2 Laporan          | 215.319.900,00            |
| 5.03.02.1.01.09                   | Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN   | 1 Dokumen          | 42.316.700,00             | Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN   | 1 Dokumen          | 42.316.700,00             |
| 5.03.02.1.01.10                   | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 1 Sistem informasi | 337.411.200,00            | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 1 Sistem informasi | 187.411.200,00            |
| 5.03.02.1.01.11                   | Pengelolaan Data Kepegawaian   | 100%               | 135.705.200,00            | Pengelolaan Data Kepegawaian   | 100%               | 135.705.200,00            |
| 5.03.02.1.01.12                   | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian  | 1 Dokumen          | 23.952.300,00             | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian  | 1 Dokumen          | 23.952.300,00             |
|                                   |  |                    |                           |  |                    |                           |

| RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022 |   |                  |                           | RENCANA KERJA <b>PERUBAHAN</b> TAHUN ANGGARAN 2022                |                  |                           |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------------------|---|------------------|---------------------------|
| Kode                              | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Target           | Pagu Indikatif Tahun 2022 | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Target Perubahan | Pagu Perubahan Tahun 2022 |
| <b>5.03.02.1.02</b>               | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                     | <b>3 Dokumen</b> | <b>1.248.265.500,00</b>   | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                     | <b>3 Dokumen</b> | <b>1.201.515.500,00</b>   |
| 5.03.02.1.02.01                   | Pengelolaan Mutasi ASN  | 1 Dokumen        | 81.974.000,00             | Pengelolaan Mutasi ASN  | 1 Dokumen        | 81.974.000,00             |
| 5.03.02.1.02.02                   | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                  | 6 Dokumen        | 309.673.500,00            | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                  | 6 Dokumen        | 292.923.500,00            |
| 5.03.02.1.02.03                   | Pengelolaan Promosi ASN   | 8 Dokumen        | 856.618.000,00            | Pengelolaan Promosi ASN   | 8 Dokumen        | 826.618.000,00            |
|                                   |   |                  |                           |   |                  |                           |
| <b>5.03.02.1.03</b>               | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                                | <b>100%</b>      | <b>1.751.786.600,00</b>   | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                                | <b>100%</b>      | <b>1.691.786.600,00</b>   |
| 5.03.02.1.03.01                   | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                 | 3 Dokumen        | 43.363.400,00             | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                 | 3 Dokumen        | 43.363.400,00             |
| 5.03.02.1.03.02                   | Pengelolaan Assessment Center                                     | 3 Dokumen        | 270.869.200,00            | Pengelolaan Assessment Center                                     | 3 Dokumen        | 270.869.200,00            |
| 5.03.02.1.03.03                   | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN               | 200 Dokumen      | 730.856.000,00            | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN               | 200 Dokumen      | 670.856.000,00            |
| 5.03.02.1.03.04                   | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                               | 4 Dokumen        | 506.726.400,00            | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                               | 4 Dokumen        | 506.726.400,00            |
| 5.03.02.1.03.05                   | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat                       | -                | 0                         | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat                       | -                | 0                         |
| 5.03.02.1.03.08                   | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | -                | 0                         | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | -                | 0                         |
| 5.03.02.1.03.09                   | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional    | 1 Dokumen        | 0                         | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional    | -                | 0                         |
| 5.03.02.1.03.10                   | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN                             | 400 Orang        | 41.593.675,00             | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN                             | 400 Orang        | 41.593.675,00             |
| 5.03.02.1.03.12                   | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN       | 2 Kegiatan       | 26.406.400,00             | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN       | 2 Kegiatan       | 26.406.400,00             |
| 5.03.02.1.03.13                   | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                  | 3 Dokumen        | 53.005.250,00             | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                  | 3 Dokumen        | 53.005.250,00             |
| 5.03.02.1.03.14                   | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional            | 400 Orang        | 78.966.275,00             | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional            | 400 Orang        | 78.966.275,00             |
|                                   |   |                  |                           |   |                  |                           |
| <b>5.03.02.1.04</b>               | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                    | <b>100%</b>      | <b>466.173.900,00</b>     | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                    | <b>100%</b>      | <b>466.173.900,00</b>     |

| RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022 |   |                          |                           | RENCANA KERJA <b>PERUBAHAN</b> TAHUN ANGGARAN 2022  |                          |                           |
|-----------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| Kode                              | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target                   | Pagu Indikatif Tahun 2022 | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target Perubahan         | Pagu Perubahan Tahun 2022 |
| 5.03.02.1.04.02                   | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 100%                     | 91.735.500,00             | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 100%                     | 91.735.500,00             |
| 5.03.02.1.04.04                   | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai      | -                        | 0                         | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai      | -                        | 0                         |
| 5.03.02.1.04.05                   | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai                 | 1 Dokumen<br>(300 Orang) | 54.443.800,00             | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai                 | 1 Dokumen<br>(300 Orang) | 54.443.800,00             |
| 5.03.02.1.04.07                   | Pembinaan Disiplin ASN                              | 2 Dokumen                | 138.535.300,00            | Pembinaan Disiplin ASN                              | 2 Dokumen                | 138.535.300,00            |
| 5.03.02.1.04.08                   | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   | 10 SK                    | 131.778.200,00            | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   | 10 SK                    | 131.778.200,00            |
| 5.03.02.1.04.09                   | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai            | 1 Dokumen<br>(15 SK)     | 49.681.100,00             | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai            | 1 Dokumen<br>(15 SK)     | 49.681.100,00             |